

Vol. 5 No. 1 Mei 2010

ISSN: 1858-0890

Jurnal Sosiologi

DIALEKTIKA



Pembangunan dan Globalisasi

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Jurnal Sosiologi
DIALEKTIKA
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Pemimpin Umum

Drs. J. Dwi Narwoko, MA

Penanggungjawab

Ketua Jurusan Sosiologi

Dewan Redaksi

Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA, Prof. Dr. Hotman M Siahaan,
Prof. Dr. Nasikun, Daniel Theodore Sparingga, Ph. D,
Dr. Soebagyo Adam, MS dan Dr. Emy Susanti, MA

Pemimpin Redaksi

Dr. Mustain Mahud, M.Si

Sekretaris Redaksi

Dr. Sutinah, MS

Redaksi Pelaksana

Drs. Bagong Suyanto, M.Si, Drs. Maksum, M.Si, Drs. Edy Herry
Pryhantoro, M.Si, Drs. Septi Ariadi, MA

Produksi dan Pemasaran

Karnaji, S.Sos, M.Si dan Sudarso, S.Sos, M.Si

Jurnal Sosiologi DIALEKTIKA, diterbitkan oleh Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, dua kali dalam setahun.

Alamat:

Jurusan Sosiologi FISIP-UNAIR

Jl. Darmawangsa Dalam, 60286

Telp. (031) 5034015, 5011744, 5047754. Fax. (031) 5012442

email: j-sosiologi-ua@yahoo.com

Focus and Scope

Jurnal Sosiologi Dialektika (JSD) is open access and peer-reviewed journal. The objective of Jurnal Sosiologi Dialektika (JSD) is to publish original research and review articles which advance the theoretical understanding of, and promote and report empirical research about the widest range of sociological topics including gender, social development, family and relationship, democracy, conflict, social movement, urban and rural society. The journal encourages, and welcomes, submission of papers which report findings using both quantitative and qualitative research methods; articles challenging conventional concepts and proposing new conceptual approaches; and accounts of methodological innovation and the research process.

DAFTAR ISI

TOPIK UTAMA

- (1) PEMBANGUNAN DAN GLOBALISASI SISTEM SOSIAL
Sebuah Tinjauan Teoritis Kontemporer
Drs. Doddy Sumbodo Singgih, M.Si 1
- (2) MENYIKAPI GLOBALISASI: DILEMA YANG DIHADAPI INDONESIA
Rahma Sugihartati 17
- (3) TUMBUHNYA KAWASAN INDUSTRI DALAM MENDUKUNG
OTONOMI DAERAH SEBUAH TINJAUAN GEOGRAFIS
Rindawati 25
- (4) PENGEMBANGAN MODAL SOSIAL DALAM MENDUKUNG
PEMBANGUNAN EKONOMI DI JAWA TIMUR
Bagong Suyanto 29
- (5) PROBLEMA DAN UPAYA PENANGANAN PENGANGGURAN
USIA MUDA DI JAWA TIMUR
Siti Mas'udah 41
- (6) PENGANGGURAN DAN PROBLEMA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PRO JOB DI JAWA TIMUR
Soebagyo Adam 57

GAGASAN

- (1) PELAYANAN PUBLIK DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA
YANG DEMOKRATIK
Dr Endang Larasati Setyaningsih 77
- (2) KONSTRUKSI GENDER DAN KESEHATAN REPRODUKSI
DI KALANGAN REMAJA PONDOK PESANTREN
Sindung Haryanto 85

STUDI

- (1) KAJIAN SOSIAL PEMBANGUNAN MASYARAKAT PERTEBUAN
MELALUI KINERJA PROGRAM SWASEMBADA GULA
NASIONAL BERDASARKAN KARAKTERISTIK DAN MAKNA
TINDAKAN PETANI TEBU
Trikuntari Dianpratiwi 100
- (2) PROBLEMA PENGEMBANGAN UMKM DI JAWA TIMUR
Septi Ariadi 113
- (3) PERPUSTAKAAN SEKOLAH BERBASIS MASYARAKAT:
PENDUKUNG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Dessy Harisanty 125

PROBLEMA PENGEMBANGAN UMKM DI JAWA TIMUR

Septi Ariadi

Dosen Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga

Potensi UMKM (Usaha Mikro Kecil-Menengah) di Provinsi Jawa Timur untuk terus berkembang dan dikembangkan sesungguhnya sangat besar. Namun, sebagai usaha berskala kecil-menengah, peluang UKM, khususnya usaha mikro untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas pangsa pasar seringkali masih terkendala faktor permodalan yang pas-pasan, akses mereka yang kurang pada pasar dan berbagai faktor lain yang sifatnya struktural.

Kendati pemerintah provinsi dan kota/kabupaten di Jawa Timur telah menganggarkan bantuan modal usaha berbunga lunak, yakni hanya 6% per tahun. Tetapi, karena prosedur yang berbelit dan berbagai persyaratan yang ketat, di berbagai daerah sudah lazim terjadi pencairan kredit bagi UMKM cenderung berjalan lambat, bahkan sangat terbatas. Di Kediri, misalnya, proses pencairan bantuan modal usaha bagi UMKM yang disalurkan lewat Badan Perkreditan Rakyat membutuhkan waktu 3 bulan hingga 1 tahun, sehingga menyulitkan para pelaku UMKM untuk dapat mengembangkan usahanya.

Bagi pelaku UMKM, dengan pemilikan modal yang terbatas, atau bahkan pas-pasan, harus diakui mustahil kita berharap sektor ekonomi kerakyatan

ini dapat menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Padahal, kalau berbicara peluang yang tersedia dan kebutuhan pasar akan produk UMKM sebetulnya masih sangat terbuka.

Gabungan Usaha Ritel Indonesia, misalnya telah menyatakan bahwa mereka membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para pelaku UMKM untuk berperan serta menggairahkan perekonomian. Para pengusaha ritel itu ditaksir mampu menyerap produk UMKM hingga 30%. Cuma, yang menjadi masalah sekarang: ketika modal yang dimiliki para pelaku UMKM sangat terbatas, bagaimana mungkin mereka dapat meningkatkan omzet dan target produksinya jika tidak segera dilakukan intervensi oleh pemerintah daerah?

Tawaran pinjaman dengan bunga hanya 6% per tahun, bagi para pelaku UMKM tentu sangat menarik dan dapat diandalkan untuk menopang perkembangan usahanya, karena tidak membebani mereka dengan kewajiban membayar bunga pinjaman yang tinggi layaknya ketentuan bank lain pada umumnya. Tetapi, selunak dan sekecil apapun bunga pinjaman yang ditawarkan, jika prosedur peminjaman masih rumit dan merepotkan, maka bisa diduga para pelaku UMKM yang beruntung tidak akan banyak.

Dari sekitar 4,2 juta unit UMKM di Provinsi Jawa Timur, tercatat baru sekitar 30% yang layak dan pelakunya sudah termasuk *bankable*. Sementara yang 70% masih perlu diberi pendampingan, terutama menyangkut administrasi usaha, inovasi serta pemasaran. Di berbagai kota/kabupaten, sudah menjadi rahasia umum bahwa tawaran pemerintah untuk menyalurkan bantuan modal usaha dengan bunga lunak, ternyata hanya bergaung di kalangan yang terbatas.

Para pelaku UMKM yang benar-benar membutuhkan bantuan modal berbunga lunak justru seringkali tidak mampu dan bahkan tidak mengetahui peluang yang ditawarkan pemerintah daerah karena kurangnya akses mereka pada informasi penting. Dengan latar belakang tingkat pendidikan yang rendah dan dukungan SDM yang terbatas, memang tidak banyak peluang yang bisa dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk mengembangkan diri secara mandiri.

Berbeda dengan pelaku usaha berskala menengah-besar yang relatif sudah lebih maju, keberadaan pelaku usaha mikro dan UKM pada umumnya tidak banyak berkembang karena berbagai keterbatasan yang membelenggu mereka. Dengan kualitas produk yang tidak terstandar dan didukung modal yang pas-pasan, di lapangan justru masih sering terjadi para pelaku UMKM menjadi korban iklim persaingan yang makin ketat dan ketidakberdayaan mereka.

Margin keuntungan yang bisa diperoleh para pelaku UMKM umumnya sangat tipis. Ketika mereka mencoba mengembangkan diri dengan cara mengkaitkan dengan usaha yang lebih

besar, tidak jarang terjadi justru di situlah dimulainya proses pensubodinasian yang makin mempersempit ruang gerak pelaku usaha mikro dan UKM untuk mengembangkan diri. Alih-alih usahanya makin berkembang, pada saat mereka menjalin relasi dengan usaha menengah atau usaha berskala besar, yang muncul justru ketergantungan dan bahkan proses marginalisasi.

Untuk mengembangkan UMKM di Provinsi Jawa Timur, jelas yang dibutuhkan tidak hanya sekadar bantuan modal yang lunak dan prosedur peminjaman yang mudah. Tetapi, lebih dari itu yang dibutuhkan sesungguhnya adalah program intervensi yang benar-benar menyentuh akar masalah dan mendukung tumbuhnya potensi swakarsa dan kemampuan para pelaku usaha mikro untuk berkembang sesuai potensi *self-help* yang mereka miliki.

Khusus untuk membantu kebutuhan modal para pelaku UMKM, di Provinsi Jawa Timur salah satu lembaga keuangan mikro yang secara teoritis memiliki peran strategis sebagai mitra sebenarnya adalah koperasi, termasuk Koperasi Wanita. Seperti diketahui, di era Pemerintahan Gubernur-Wakil Gubernur terpilih – Pakde Karwo dan Gus Ipul – Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memutuskan untuk memfasilitasi dan mendorong pengembangan koperasi yang khusus dikelola oleh perempuan, atau yang lazim disebut Koperasi Wanita (Kopwan). Di tahun 2010 ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mematok target pertambahan Kopwan sekitar 125% dari rencana sebelumnya 2.000 unit menjadi 4.250 unit, dengan menghadirkan satu koperasi di setiap kelurahan dan desa. Secara

kelembagaan, kenapa pemerintah berkomitmen untuk mendorong pengembangan Kopwan, karena selama ini dari 19.405 koperasi yang ada di Jawa Timur, ternyata hanya 3% yang dikelola wanita. Padahal, secara umum tingkat kesehatan koperasi yang dikelola perempuan cenderung lebih baik dibandingkan koperasi lainnya.

Lebih dari sekadar usaha simpan-pinjam, kehadiran Kopwan selain diharapkan dapat menjadi salah satu wadah yang sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga anggota Kopwan, dan media aktualisasi diri perempuan, sebagai salah satu lembaga keuangan mikro yang ada di tingkat bawah, kehadiran Kopwan juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi kerakyatan, mampu mengikis keberadaan rentenir, *bank thithil* dan tengkulak yang seringkali menetapkan suku bunga yang mencekik leher, dan sekaligus ikut berperan aktif dalam upaya penanganan kemiskinan di masyarakat sekitarnya.

Berbeda dengan lembaga perbankan formal yang memiliki pranata dan aturan yang ketat, sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Mikro, kehadiran koperasi, termasuk Kopwan umumnya dikelola secara lebih fleksibel dan berbasis pada pendekatan yang sifatnya kekeluargaan, tanpa harus terjebak pada bias dan pertimbangan subyektif yang akan berdampak kontra-produktif. Di masing-masing daerah, tidak menutup kemungkinan cara dan model pengelolaan koperasi yang diterapkan pengurus berbeda satu dengan yang lain. Tetapi, terlepas apapun model pengelolaan yang

diterapkan, tentu yang diharapkan keberadaan dan eksistensi koperasi tidak hanya memikirkan aspek efisiensi pengelolaannya saja –dalam arti hanya mementingkan bagaimana menjaga agar kasus tunggakan angsuran anggota tidak terjadi–, tetapi yang tak kalah penting adalah bagaimana memastikan kehadiran koperasi juga mampu menjalankan peran yang efektif sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Mikro yang bertanggungjawab mendorong pengembangan usaha ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan anggotanya.

Kajian sebagaimana dilaporkan selain bermaksud memetakan situasi problematik yang dihadapi para pelaku UMKM dalam pengelolaan usahanya, juga sekaligus bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan untuk meningkatkan peran koperasi dalam mendukung pengembangan UMKM di Provinsi Jawa Timur.

1. Metodologi

Kegiatan ini pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi persebaran UKM di Provinsi Jawa Timur, tetapi juga sekaligus memetakan situasi problematik serta menyusun kebijakan dan program prioritas untuk memberdayakan UKM melalui revitalisasi peran koperasi.

Agar bisa diperoleh hasil yang benar-benar maksimal, secara rinci, langkah-langkah yang ditempuh dalam kegiatan ini adalah:

Pertama, melakukan *review* terhadap berbagai kajian dan penelitian tentang kondisi dan perkembangan UKM dan

koperasi di Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya. *Review* ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang faktor-faktor teoritik yang mempengaruhi pasang-surut perkembangan UKM, jaringan pemasaran, dan model-model pengembangannya yang relevan.

Kedua, mengumpulkan dan melakukan analisis terhadap data terbaru tentang kondisi koperasi dan UKM di berbagai kota/kabupaten di Jawa Timur. Dalam kegiatan ini, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara melacak data dari Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, dan Badan Pusat Statistik Provinsi

Ketiga, mengumpulkan dan melakukan analisis terhadap data primer yang digali langsung dari aspirasi dan pengalaman para pelaku UKM di berbagai daerah di Provinsi Jawa Timur. Untuk sampel lokasi pengumpulan data primer, telah ditetapkan 8 kota/kabupaten, yaitu: Kabupaten Sampang, Pamekasan, Tuban, Lamongan, Jombang, Nganjuk, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Malang. Di masing-masing kota/kabupaten jumlah responden yang diteliti ditetapkan sebanyak 50 pelaku UMKM. Kriteria responden yang diteliti adalah: (1) pelaku UKM; (2) UKM yang bersangkutan menghasilkan produk yang dipasarkan, baik di tingkat lokal maupun regional, (3) pelaku UKM yang diwawancarai minimal telah menekuni usahanya 1 tahun, dan (4) tinggal di lokasi penelitian.

Tabel 1
Lokasi dan Responden Penelitian

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Jenis UKM	Jumlah
Jombang	Gudo	Plumbon gambang	Aksesoris manic-manik	50
Pasuruan	Gading rejo	Randusari	Mebel	50
Malang	Sanan	Purwantoro	Keripik tempe	50
Lamongan	Paciran	Sendang dhuwur	Bordir pakaian dan kerudung	50
Sampang	Camplong	Camplong	Ikan asin	50
Pamekasan	Klampar	Banyumas	Batik tulis dan cap	50
Tuban	Merak-urak	Banggal	Kerupuk	50
Nganjuk	Kertosono	Tembarak	Tempe	50
Jumlah				400

Jawa Timur. Gambaran umum kondisi koperasi dan UKM ini perlu diketengahkan untuk mengetahui gambaran makro persebaran dan potensi berbagai UKM yang ada di Provinsi Jawa Timur.

Keempat, dari 400 pelaku UMKM yang diteliti, dalam studi ini kemudian dipilih 40 informan yang diwawancarai secara mendalam (*indepth interview*), terutama menyangkut kebutuhan modal, hubungan mereka dengan berbagai

lembaga keuangan mikro, termasuk koperasi, dan mekanisme survival yang dikembangkan untuk menyaingi iklim persaingan usaha yang makin ketat. *In-depth interview* dilakukan dengan mendasarkan pada *interview guide* yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Seluruh data yang diperoleh dari lapangan, telah diedit dan ditabulasi dengan mempergunakan program SPSS. Program SPSS ini sengaja dipilih untuk memudahkan tim peneliti melakukan pengolahan dan analisis data. Entri data dilakukan setelah tim surveyor melakukan proses pengkodean dan editing data. Verifikasi untuk data yang dianggap perlu, dilakukan tim peneliti untuk memperoleh akurasi dan obyektivitas data yang diperoleh.

Di akhir laporan yang disusun, selain dirumuskan kembali sejumlah isu prioritas di seputar persoalan pemberdayaan UKM di Provinsi Jawa Timur dan kendala yang menghambat pengembangan UKM, juga dikemukakan sejumlah program prioritas yang diharapkan dapat dijadikan acuan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dalam menyusun revitalisasi koperasi dan program intervensi untuk mempercepat upaya pemberdayaan UMKM di tahun 2011 nanti.

2. Kesimpulan

Dari hasil kajian yang telah dilakukan, beberapa isu prioritas yang perlu memperoleh perhatian adalah:

1. Warga masyarakat yang terlibat dalam UMKM umumnya memiliki latar belakang pendidikan yang terbatas, rentan, dan secara ekonomi pas-pasan, bahkan kekurangan. Para pelaku usaha

mikro, mereka umumnya mengalami proses penurunan status ekonomi, karena margin keuntungan yang diperoleh cenderung terus menurun dan tidak sebanding dengan biaya produksi yang harus dikeluarkan. Akibat tidak memiliki pekerjaan sampingan, para pelaku UMKM akhirnya tidak memiliki sumber penghasilan alternatif yang bisa diandalkan untuk menyangga kelangsungan kehidupannya.

2. Meski hasil yang diperoleh tidak terlampau besar, bahkan relatif pas-pasan. Tetapi para pelaku UMKM menilai keterlibatan mereka dalam sektor UMKM memiliki kelebihan daya tarik tersendiri, mulai dari rutinitas penghasilan yang bisa diperoleh secara harian maupun mingguan, fleksibilitas waktu kerja hingga aspek daya serap UMKM yang cenderung bersifat involutif: sangat mudah menyerap dan menampung siapapun yang berminat bekerja di sektor ini. Dibanding sektor pertanian, perikanan, perdagangan, sektor informal atau bekerja sebagai buruh pabrik, bekerja di sektor UMKM dinilai lebih menguntungkan, terutama bagi perempuan, karena mereka bisa mengatur jam kerja yang fleksibel, mengerjakan pesanan secara borongan, sembari tetap mengerjakan beban tugas domestik sehari-hari.

3. Pangsa pasar produk UMKM cenderung terbatas, dan skala usaha yang dikembangkan umumnya masih banyak yang tergolong usaha mikro dan kecil. Sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil, umumnya tidak

memiliki modal sendiri, mereka cenderung tergantung pada dukungan dari berbagai sumber permodalan dari luar. Dalam kenyataan, tidak sekali-dua kali para pelaku UMKM mengalami dan harus menanggung terjadinya proses pengikisan modal, karena nilai tukar yang makin tidak seimbang dengan keuntungan yang diperoleh. Margin keuntungan yang bisa diperoleh para pelaku UMKM relatif tidak proporsional. Dalam hal ini, pihak yang lebih dominan menentukan kesepatan harga jual produk umumnya adalah pengijon, tengkulak dan pedagang perantara.

4. Akses para pelaku UMKM ke berbagai sumber permodalan dan sumber-sumber daya produktif umumnya lemah, sebaliknya peluang untuk mengakses ke lembaga kredit informal, terutama rentenir dan pengijon umumnya relatif mudah. Tetapi karena posisinya yang tersubordinasi, para pelaku UMKM yang memanfaatkan dana pinjaman dari para pelepas uang informal umumnya harus menanggung beban suku bunga yang sangat tinggi dan karenanya membuka peluang bagi pelaku UMKM masuk dalam pusaran perangkat spiral kemiskinan.
5. Untuk meningkatkan kapasitas usahanya, para pelaku UMKM biasanya mengembangkan mekanisme diversifikasi produk. Upaya untuk mencoba memperluas pangsa pasar, diakui sangat sulit dilakukan. Bahkan, prospek pengembangan usaha mikro dan kecil-menengah diakui para pelaku UMKM relatif suram, karena iklim persaingan yang makin kompetitif dan

serbuan produk-produk import yang dari segi harga acapkali justru lebih rendah.

6. Peran Kopwan dalam mendukung upaya pengembangan UMKM relatif terbatas, karena tidak adanya dukungan modal kerja Kopwan yang memadai. Sementara itu, dukungan permodalan dari lembaga perbankan umumnya juga rendah, baik karena syakwasangka terhadap kemampuan pengelola UMKM maupun karena ketidakmengertian pelaku UMKM tentang prosedur dan urusan administrasi proses peminjaman di bank.
7. Untuk mendukung upaya pengembangan UMKM, selain dukungan modal usaha berbunga murah, yang dibutuhkan para pelaku UMKM adalah akses pada pasar, dan bantuan dalam bentuk aset produksi yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja UMKM.

3. Arah Kebijakan

Di tengah kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih, harus diakui bukanlah hal yang mudah untuk mendorong dan memfasilitasi upaya pengembangan UMKM dan koperasi di Provinsi Jawa Timur. Kajian sebagaimana dilaporkan, telah berhasil memetakan bahwa situasi problematik yang dialami para pelaku UMKM dalam melangsungkan dan mengembangkan usaha yang mereka tekuni sungguh sangat kompleks, dan tidak mungkin bisa ditangani hanya melalui pendekatan ekonomi semata, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek sosial yang melekat di dalamnya.

Sebagai sebuah aktivitas dan lembaga

usaha, studi ini menemukan meski sebagian pelaku UMKM telah berhasil mengembangkan usahanya dan terbukti menguntungkan, tetapi tidak sedikit pelaku UMKM yang masih berkuat pada berbagai kelemahan internal, mulai dari kualitas SDM yang relatif kurang, posisi pelaku yang ter subordinasi, hingga akses mereka yang lemah pada berbagai sumber daya produktif. Untuk membantu dan mendorong peningkatan keberdayaan UMKM di Provinsi Jawa Timur, oleh sebab itu ke depan kebijakan pokok yang perlu dikembangkan adalah:

Pertama, berkaitan dengan peran Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur menciptakan iklim usaha yang benar-benar kondusif (*conducive business climate*), dan sekaligus menyediakan lingkungan yang mampu (*enabling environment*) mendorong pengembangan aktivitas usaha dan kelangsungan UMKM secara sistemik, mandiri, dan berkelanjutan. Lebih dari sekadar dukungan dalam bentuk aturan atau Peraturan Daerah yang memberikan kepastian hukum perlindungan bagi UMKM, yang perlu dikembangkan di sini adalah kemudahan ekonomi (*economic facilities*) yang benar-benar nyata dan peluang-peluang sosial (*social opportunities*) yang memihak kepada para pelaku UMKM. Yang dimaksud kemudahan ekonomi, adalah kesempatan dan makin terbukanya akses pelaku UMKM terhadap berbagai sumber permodalan dan pasar yang tidak dibayang-bayangi dengan syakwasangka yang seringkali mendiskreditkan. Sedangkan yang dimaksud peluang-peluang sosial adalah upaya untuk meningkatkan kesempatan

masyarakat yang menekuni UMKM melakukan mobilitas sosial-ekonomi secara vertikal melalui pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan bahkan kebutuhan untuk melakukan partisipasi politik secara aktif. Kebijakan dan strategi pertama ini pada dasarnya merupakan penerjemahan dari fungsi pemerintah sebagai regulator dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah harus mampu mengembangkan regulasi-regulasi ekonomis yang dapat memberikan tingkat kepastian usaha sekaligus memberikan pemihakan yang tepat kepada segenap pelaku UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Kedua, berkaitan dengan peran Pemerintah Daerah dalam menciptakan sistem penjaminan (*guarantee system*) secara finansial terhadap operasionalisasi kegiatan usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh UMKM. Bentuk kongkrit kebijakan yang dikembangkan di sini bisa berupa pemberian jaminan finansial kepada bank atau sumber-sumber permodalan lain, yang berfungsi sebagai semacam garansi atau asuransi agar para UMKM diberi kesempatan untuk mengakses dukungan modal yang dibutuhkan tanpa harus dibayang-bayangi dengan syakwasangka yang berlebihan dan kekhawatiran bahwa mereka tidak akan bisa mengembalikan pinjaman modal usahanya itu di kemudian hari. Seperti diketahui, selama ini harus diakui masih ada sikap dari bank atau sumber-sumber permodalan lain yang acapkali minor dan bersyakwasangka kepada para pelaku UMKM, khususnya pelaku usaha mikro, yang seringkali dicurigai sebagai calon pengemplang utang

dan penyebab utama terjadinya kredit macet. Dengan diberikan jaminan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, diharapkan ke depan tidak ada lagi perlakuan diskriminatif kepada para pelaku UMKM.

Kebijakan dan strategi kedua ini pada dasarnya merupakan solusi terobosan terhadap adanya "gap" antara UMKM, dan perbankan/lembaga keuangan bukan bank, dalam hal permodalan/pembiayaan usaha. Secara empiris, selama ini UMKM terutama usaha mikro sangat sulit untuk memenuhi kriteria 5-C (*character, condition of economy, capacity to repay, capital, collateral*) yang merupakan aturan/mechanisme baku perbankan dalam penyaluran kredit untuk membiayai usaha dan permodalan. Oleh karenanya, wajar apabila selama ini pemerintah melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan lebih cenderung menciptakan sekaligus menyediakan skema "kredit program" yang lebih banyak bersifat "dana hibah bergulir" kepada berbagai kelompok masyarakat (pokmas) yang bergerak dalam usaha mikro. Meski dalam batas-batas tertentu skema kredit dalam bentuk bantuan hibah telah memperlihatkan hasil. Tetapi, pola seperti ini sesungguhnya rawan macet dan bukan tidak mungkin akan membebani keuangan daerah.

Selama ini, diakui atau tidak pengalaman implementasi berbagai skema kredit program ternyata tidak terlalu berhasil terutama berkaitan dengan tingkat kemacetan kredit dan semakin menipisnya dana hibah bergulir tersebut sebagai akibat rendahnya akuntabilitas di tingkat

masyarakat yang disebabkan oleh persepsi yang keliru bahwa dana tersebut adalah milik masyarakat yang tidak perlu dipertanggungjawabkan kepada pemerintah.

Dengan berkaca dari pengalaman dan kelamahan di masa lalu, ke depan Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu merubah strategi pembiayaan UMKM dari yang bersifat pemberian bantuan langsung kepada masyarakat (*cash transfer*) dalam bentuk hibah (*grant*) menjadi yang lebih bersifat penempatan dana (*fund placement*) di perbankan sebagai dana penjaminan (*cash collateral*) yang akan digunakan sebagai jaminan pengganti (*substitute collateral*) untuk menjamin kelangsungan operasionalisasi UMKM. Dengan dana penjaminan ini diharapkan perbankan akan terdorong untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya kepada UMKM sesuai dengan "business plan" masing-masing yang telah dikalkulasi dan ditetapkan sebelumnya.

Secara finansial, kebijakan dan strategi penciptaan dan penyediaan dana penjaminan seperti di atas akan memberikan dua keuntungan, yaitu: Pertama, pemerintah dapat lebih mengefektifkan penggunaan dana APBD yang akan dialokasikan untuk pengembangan UMKM melalui mekanisme tidak langsung yaitu dengan penempatan dana pemerintah sebagai "pos penjaminan" di rekening perbankan untuk menjamin penyaluran kredit dan mengganti kemacetan kredit UMKM (*provisioning non performing loan*). Kedua, penempatan dana penjaminan tersebut akan menciptakan "multiplier effect" yang

sangat besar melalui dorongan kepada perbankan untuk menyalurkan kredit secara besar-besaran kepada UMKM. Dengan kata lain, kebijakan dan strategi tersebut akan menghasilkan “efektivitas fiskal” sekaligus “ekspansi moneter” yang mampu memberikan injeksi permodalan yang luar biasa besar bagi upaya pemberdayaan UMKM secara sistemik, profesional dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Ketiga, berkaitan dengan peran Pemerintah Daerah dan *stakeholder* terkait untuk menyediakan bantuan teknis dan pendampingan (*technical assistance and facilitation*) secara manajerial guna meningkatkan status usaha UMKM agar “feasible” sekaligus “bankable” dalam jangka panjang. Bentuk dukungan yang diberikan selama proses pendampingan, bisa berupa layanan jasa konsultasi, pendampingan manajerial, atau dalam bentuk fasilitas dan dukungan promosi bagi berbagai produk UMKM agar mereka bisa mengakses pangsa pasar yang lebih luas, serta sekaligus meningkatkan efisiensi dalam proses produksi yang dikembangkan.

Kebijakan dan strategi ketiga ini sesungguhnya selama ini telah banyak dilakukan. Namun, satu hal yang perlu digarisbawahi, dalam proses pendampingan yang dilakukan biasanya pola dan cara berpikir yang ditransplantasikan kepada para pelaku UMKM adalah bahwa yang dimaksud pola pengembangan UMKM adalah bersifat linier: usaha yang dikembangkan didorong untuk terus berkembang membesar, tanpa mempertimbangkan kemampuan dan daya saing yang dimiliki

para pelaku UMKM itu sendiri. UMKM pada dasarnya adalah institusi bisnis yang spesifik, khas bagi masyarakat golongan menengah ke bawah. Dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, ada baiknya jika disadari bahwa upaya mendorong pengembangan UMKM tidaklah selalu harus dilakukan secara linier, melainkan bisa pula dilakukan secara horisontal: membesar ke samping melalui pengembangan diversifikasi produk maupun pengembangan usaha-usaha alternatif yang unik, tetapi tetap ada dalam level atau skala usaha yang terbatas.

4. Program Prioritas

Dalam rangka memterjemahkan arah kebijakan seperti dikemukakan di atas, untuk tahun 2011, sejumlah program prioritas yang perlu dikembangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut:

1. Program penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM, yang didukung basis data yang akurat dan *up to date*, serta didukung oleh kelembagaan yang relevan, khususnya koperasi yang memiliki akar kultural dan dikelola oleh masyarakat setempat.
2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM, yang mendorong tumbuhnya diversifikasi produk yang dihasilkan, kemampuan daya saing dan kemandirian para pelaku UMKM dalam menyongsong era persaingan bebas yang makin kompetitif. Sejauh memungkinkan, keunggulan

kompetitif yang dibangun diharapkan mampu menggali kekayaan unsur budaya, dengan mengandalkan dukungan para wirausahawan muda yang kreatif, wirausahawan perempuan yang tangguh, dalam rangka mendorong perkembangan UMKM yang berprestasi.

3. Program penempatan dana jaminan perbankan bagi UMKM yang sewaktu-waktu dapat menjadi dana pengganti jika terjadi kemacetan usaha yang ditekuni para pelaku UMKM.
4. Program pendampingan dan layanan konsultasi pengembangan UMKM yang tidak hanya melibatkan Lembaga Jasa Pengembangan Bisnis (*Business Development Services*), tetapi juga peran serta praktisi atau pelaku UMKM yang terbukti memiliki pengalaman dan kreativitas dalam upaya pengembangan usaha yang mereka tekuni. Dalam proses pendampingan ini, pihak Dinas Koperasi dan UKM seyogianya juga ikut ambil bagian, semisal dalam bentuk pendirian lembaga konsultasi atau klinik UMKM yang setiap saat selalu bersedia membuka layanan jasa konsultasi, memberikan informasi bisnis yang mendukung UMKM, layanan advokasi, dan juga berbagai bentuk pelatihan yang bermanfaat bagi peningkatan pengetahuan manajemen dan kepekaan para pelaku UMKM dalam membaca tantangan serta kebutuhan pasar.
5. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM di Provinsi Jawa Timur. Program ini dikembangkan dalam rangka membuka akses para pelaku UMKM terhadap berbagai sumber daya produktif dan sumber-sumber permodalan, termasuk akses pada pasar yang makin luas agar para pelaku UMKM dapat memanfaatkan peluang-peluang usaha yang ada semaksimal mungkin. Bentuk kegiatan yang dikembangkan di sini bisa berupa bantuan promosi berbagai produk UMKM ke tingkat regional, nasional atau bahkan ke luar negeri, bantuan berupa modal bergulir yang berkelanjutan atau bantuan dalam bentuk berbagai aset produksi yang bisa dimanfaatkan pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi maupun melakukan efisiensi dalam proses produksi.
6. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, termasuk pengembangan Koperasi Wanita yang bertujuan untuk memberi ruang bagi kaum perempuan untuk beraktualisasi diri sekaligus kesempatan bagi perempuan terlibat dalam proses dan kegiatan produktif yang bisa dimanfaatkan untuk memperkuat penyangga ekonomi keluarga.
7. Program pengembangan usaha mikro atau kegiatan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat miskin. Program ini khusus ditujukan kepada masyarakat miskin agar mereka memiliki kesempatan dan kemampuan untuk mengembangkan kegiatan produktif yang mandiri, efisien dan bermanfaat untuk menambah sumber-sumber penghasilan alternatif yang berkelanjutan.

Tabel 2
Kebijakan, Program Prioritas dan Kegiatan Dalam Rangka Pengembangan Koperasi dan UMKM di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011

Kebijakan	Program Prioritas	Kegiatan
Penciptaan iklim usaha dan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan UMKM	Program penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM. Program pengembangan sistem pendukung UMKM.	Pengembangan wiraswastawan muda. Pengembangan wiraswastawan perempuan dan Koperasi Wanita (Kopwan). Pengembangan Ruang Pamer Produk UMKM Jatim. Pengembangan UMKM berbasis potensi budaya lokal.
Pengembangan sistem jaminan finansial bagi pengembangan UMKM	Program penempatan dana (<i>fund placement</i>) di perbankan sebagai dana penjaminan kelangsungan operasionalisasi UMKM	Penempatan dana jaminan UMKM dari APBD. Pelatihan manajemen dan <i>business plan</i> .
Kebijakan pendampingan dan layanan bagi pengembangan UMKM	Program pendampingan dan layanan konsultasi UMKM. Program pengembangan kualitas kelembagaan koperasi. Program pengembangan usaha mikro bagi masyarakat miskin.	Pengembangan Klinik UMKM. Pendampingan dan konsultasi bagi UMKM. Pemberdayaan koperasi. Pelatihan ketrampilan alternatif bagi masyarakat miskin, khususnya perempuan. Pengembangan deversifikasi usaha mikro masyarakat miskin. Bantuan modal usaha mandiri.

Dari berbagai program prioritas yang dikemukakan di atas, sudah barang tentu masih perlu ditindaklanjuti dengan rincian kegiatan yang lebih aplikatif dan kontekstual. Seperti dipaparkan dalam Tabel VII.1, bahwa dalam rangka mendorong pengembangan koperasi dan UMKM di Provinsi Jawa Timur, yang dibutuhkan selain program dan kegiatan pendampingan, pelatihan dan sistem pendukung yang fungsional, yang tak kalah penting adalah dikembangkannya program-program dan kegiatan terobosan yang benar-benar bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan dan

pengembangan koperasi dan UMKM di Provinsi Jawa Timur.

Seperti telah dilaporkan dalam bab-bab terdahulu, bahwa sebagai aktivitas ekonomi kerakyatan, keberadaan UMKM, khususnya usaha mikro umumnya membutuhkan pembinaan dan proses pendampingan agar lebih "*feasible*" dan dapat dibina secara finansial agar "*bankable*" serta dapat dikembangkan menjadi usaha yang lebih besar dalam jangka panjang.

Secara lebih rinci, paling-tidak ada tiga hal yang perlu dikembangkan selama proses pendampingan dan pemberdayaan UMKM di Provinsi Jawa Timur agar lebih

feasible dan *bankable*. Pertama, aspek administratif yang meliputi aktivitas penyusunan sistem administrasi keuangan, penyusunan laporan keuangan, proyeksi cashflow, proposal kelayakan usaha dan sebagainya. Kedua, aspek legalitas yang meliputi persiapan ijin usaha, kontrak kerjasama dan advokasi. Ketiga, aspek pemasaran dan teknis yang meliputi informasi dan akses pasar, *database supplier*, informasi teknologi, *software-hardware* dan lain sebagainya (*).

5. Daftar Pustaka

- Dewayanti, Ratih & Erna Ermawati Chotim. 2004. *Marjinalisasi dan Eksploitasi Perempuan Usaha Mikro di Pedesaan Jawa*. Bandung: Akatiga dan ASPPUK.
- Chambers, Robert, *Pembangunan Desa, Mulai Dari Belakang*, (Jakarta: LP3ES, 1987).
- Ikhsan, Mohamad, 2004. "Mengembalikan Laju Pertumbuhan Ekonomi Dalam Jangka Menengah: Peran Usaha Kecil dan Menengah", dalam: *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 9, No. 2 Agustus 2004.
- Irawan, Andi & Bayu Airlangga Putra (eds.), 2007. *Kewirausahaan UKM, Pemikiran dan Pengalaman*. Surabaya: Graha Ilmu.
- James, Kenneth dan Narongchai Akrasane, 1993. *Aspek-Aspek Finansial Usaha Kecil dan Menengah: Studi Kasus ASEAN*. Jakarta: LP3ES.
- Korten, D.C., dan Sjahrir, 1988. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mubyarto dkk. 1993. *Duapuluh Tahun Penelitian Pedesaan*. Yogyakarta: Aditya Media dan P3PK UGM.
- Marsuki, 2006. *Pemikiran dan Strategi Memberdayakan Sektor Ekonomi UMKM di Indonesia*. Jakarta: Kerjasama Penerbit Mitra Wacana dengan Fakultas Ekonomi UNHAS, Gerbang Emas Sulsel, BTN dan Yayasan Massaile.
- Nugroho, Iwan & Dahuri, Rochmin, 2004. *Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Suyanto, Bagong & Karnaji, 2005. *Kemiskinan dan Kesenjangan: Ketika Pembangunan Tak Berpihak Rakyat*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Seri Kajian Fiskal dan Moneter, 1992, *Pengentasan Kemiskinan Melalui Kredit Pedesaan*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Perpajakan dan Keuangan).
- Tjitrosoepomo, Gembong dkk. 1991. *Industri Pedesaan dan Masalah Pengembangannya*. Yogyakarta: Universitas Wangsa Manggala.
- Tambunan, Tulus. 1999. *Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Wie, Thee Kian. 1981. *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan, Beberapa Pendekatan Alternatif*. Jakarta: LP3ES.
- Widyaningrum, Nurul dkk. 2003. *Pola-pola Eksploitasi Terhadap Usaha Kecil*. Bandung: Akatiga.
- Yustika, Ahmad Erani. 2003. *Negara Vs Kaum Miskin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.